

Analisis Terciptanya Transisi Kepemimpinan Baru Dalam Perhelatan Pilkada Ponorogo Dilihat Dari Perspektif Masyarakat

Abduh Budiarmo¹⁾, Jusuf Harsono²⁾

¹⁾²⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jl. Budi Utomo No. 10, Kel. Ronowijayan, Kec. Siman Ponorogo
Email: abduhosaka@gmail.com¹⁾, jsfharsono@gmail.com²⁾

ABSTRACT

The implementation of the Ponorogo regional election in 2020 is indeed in a special atmosphere, considering that two competitor pairs of candidates are fighting for people's sympathies in order to grab seat number 1 in Ponorogo. In welcoming the people's democratic party, the hot atmosphere is identical to be found in the field. Regional election is a prestigious event to determine the fate of the region for the next 5 years, so that all parties are competing to give their best. In Ponorogo, both of successful team and volunteers from both pairs of candidates showed enthusiasm and support in many ways interestingly, the competition in the Ponorogo regional election was between two old competitors namely Sugiri Sancoko VS Ipong Muchlissoni where in the previous regional election (2015) had heated up to a dispute over the election results. A new chapter has begun, but the atmosphere of competition is certainly more heated for both sides. The leadership note of the regent of Ipong Muchlissoni is a major highlight, which has been felt by the people of Ponorogo through experience and understanding over the past 5 years. This researches aims to narrow the perspective of society, so that it provides a concrete picture of two possibilities, namely: the emergence of a new leader, or retaining an old leader. Because officially in the Ponorogo regional election in 2020 there are only two candidates, it is very interesting to conduct this research.

Keywords : Transition, Leadership, Regional Election

ABSTRAK

Pelaksanaan Pilkada Ponorogo di tahun 2020 ini memang berada pada atmosfer yang spesial, mengingat dua kompetitor pasangan calon saling memperebutkan simpati rakyat demi merengkuh kursi nomor 1 di Ponorogo. Dalam menyambut pesta demokrasi rakyat, suasana yang panas memang sangat identik ditemukan di lapangan. Pilkada merupakan ajang bergengsi untuk menentukan nasib daerah selama kurun waktu 5 tahun ke depan, sehingga seluruh pihak saling berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Di Ponorogo, baik timses maupun relawan dari kedua pasangan calon sama-sama menunjukkan antusiasme dan dukungan melalui banyak cara. Menariknya persaingan pada Pilkada 2020 di Ponorogo adalah antara dua kompetitor lama yakni Sugiri Sancoko VS Ipong Muchlissoni dimana pada Pilkada periode sebelumnya (2015) sempat memanas akibat adanya sengketa hasil Pilkada. Babak baru telah dimulai, namun atmosfer persaingan tentu lebih memanas dari kedua belah pihak. Catatan kepemimpinan Bupati Ipong Muchlissoni menjadi sorotan utama, yang telah dirasakan oleh masyarakat Ponorogo melalui pengalaman dan pemahaman selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengerucutkan perspektif masyarakat, hingga memberikan gambaran konkrit tentang dua kemungkinan yakni: munculnya pemimpin baru, atau mempertahankan pemimpin lama. Karena secara resmi dalam Pilkada Ponorogo di tahun 2020 ini hanya ada dua calon kandidat, maka sangat menarik untuk melakukan penelitian ini.

Kata Kunci : Transisi, Kepemimpinan, Pilkada

1. Pendahuluan

Perubahan UUD 1945 yang sejak lama dilakukan telah membawa perubahan mendasar bagi mekanisme dan prinsip ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu dampak signifikan adalah perihal sistem Pemilihan Umum di daerah (Pilkada) yang mekanismenya adalah rakyat melakukan pemilihan secara langsung terhadap kandidat pemimpin. Nilai dasar yang dimaksudkan dari adanya perubahan pada UUD 1945 dapat dimaknai sebagai implementasi penting dimana posisi rakyat kembali berada dalam kasta paling tinggi. Kedaulatan kembali ke tangan rakyat, artinya secara langsung rakyat sendiri memiliki ruang dan potensi untuk berperan aktif dalam mengawal dan memajukan daerahnya masing-masing. Indeks demokrasi juga semakin naik jika dalam setiap moment rakyat selalu diajak untuk terlibat seperti misalnya pada saat pengambilan keputusan, musyawarah, maupun evaluasi kinerja dari pemerintah (Lili dalam Widodo, 2015).

Menurut Marijan dalam (Sutrisno, 2017) substansi dari adanya gelaran Pilkada sejatinya merupakan bagian yang penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat di Indonesia, terutama sejak saat era reformasi berjalan. Pada sistem yang berjalan saat ini, demokrasi menjadi begitu fleksibel dan mampu untuk mengakomodir keterlibatan rakyat secara langsung dalam menentukan kriteria pemimpin pilihan, sehingga output yang diharapkan melalui pemilihan langsung adalah sosok pemimpin (kepala daerah) terpilih akan bekerja sesuai dengan kehendak murni rakyat atau dengan kata lain mengedepankan kepentingan rakyat tanpa intervensi pihak luar.

Dalam konteks demokrasi, dinamika politik dan pemerintahan lokal seperti perhelatan Pilkada akan menentukan bagaimana wajah demokrasi Indonesia secara skala nasional. Karena itu, Pilkada serentak juga merupakan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih luas, serta menghimpun banyak kepercayaan terhadap calon kandidat. Parameter kesuksesan pelaksanaan Pilkada juga dapat dilihat dari seberapa dominan rasa antusias rakyat dalam berpartisipasi, atau pun dari bentuk euforia mulai dari masa kampanye hingga jelang hari pencoblosan tiba. Namun sejatinya kualitas dan kuantitas tidak memiliki korelasi yang erat, dalam arti lain bahwa besarnya partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam Pilkada belum tentu diimbangi dengan adanya kualitas dari segi sikap, tindakan, prinsip, maupun proses pemilihan itu sendiri (Akbar, 2017).

Sebagai unsur utama dalam menentukan nasib daerah masing-masing, tentunya setiap kelompok masyarakat memiliki pola dan pemikiran sendiri-sendiri. Pada akhirnya perbedaan kondisi dan kriteria di setiap daerah lambat laun akan membentuk suatu prinsip dalam berpolitik, selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana menghubungkan prinsip politik pada identifikasi lapangan dengan cara mengenali calon-calon pemimpin yang ada. Sehingga muncul rasionalitas dalam menentukan pilihan, dimana didasari oleh kejelasan analisis maupun pemahaman mendalam terhadap sosok

calon pemimpin secara masif mulai dari rekam jejak, prestasi, akhlak, kualitas visi misi, atau bahkan keyakinan.

Salah satu teori kepemimpinan yang dapat dijadikan acuan adalah teori “orang besar” yang mendefinisikan bahwa sejatinya sosok seorang pemimpin telah mewarisi suatu keistimewaan dalam dirinya, suatu kondisi dimana karakteristik dan kualitas bersatu padu serta sifatnya yang memisahkan diri dari sifat-sifat non-kepemimpinan. Teori ini memandang bahwa yang istimewa adalah konteks yang diperlihatkan oleh sosok pemimpin tersebut, bukan pada figuritas atau pun internal kepribadian (Muluk dalam Putra, 2017).

Korelasi antara konteks kepemimpinan dengan dinamika aspirasi dan kebutuhan masyarakat merupakan satu kesatuan yang sejajar dan saling mempengaruhi, serta keduanya memiliki beban moral yang sama untuk memajukan kualitas daerah. Antara masyarakat dan pemimpin daerah idealnya tidak berada pada siklus dan pola hubungan yang timpang, sehingga keselarasan dalam memajukan pembangunan daerah akan dilalui dengan kompak. Ketika sosok pemimpin daerah merupakan tokoh yang lahir dari masyarakat kelas bawah, maka idealnya jiwa kerakyatan sangat erat melekat. Ikatan batin yang kuat, sangat mungkin akan meminimalisir potensi konflik sekaligus membawa dampak lebih baik bagi kebutuhan masyarakat di dalamnya.

Beberapa daerah di Indonesia telah berhasil mencatatkan suatu kepemimpinan melalui ciri khas yang ditonjolkan oleh sosok atau figur, sehingga fenomenanya menjadi buah bibir serta membuat publik menjadi familiar. Baik cara kepemimpinan dan terobosan yang dilakukan pada akhirnya berubah menjadi sorotan publik, terlepas dari faktor kekurangan yang mungkin tidak diketahui publik. Dalam bukunya yang berjudul “Developing The Leaders Around You”, C. Maxwell mengatakan bahwa pemimpin dalam suatu organisasi dituntut harus mampu menjadi agen perubahan untuk mewakili lingkungannya. Seorang pemimpin harus bergerak secara aktif untuk menentukan arah dan tujuan dari lingkungannya, serta melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya adalah memperbaiki tatanan sebelumnya demi tercapainya keselarasan dan terjaga nya iklim kondusif pada masyarakat (Ramdhani, 2015).

Parameter kesuksesan suatu pemilihan kepada daerah adalah dengan terpilihnya kepala daerah yang menempatkan kedaulatan rakyat pada tingkatan tertinggi, serta memahami secara utuh bahwa kedaulatan mutlak berada di tangan rakyat. Sesuai dengan perwujudan pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks yang lain, dominansi kepentingan partai politik harus dikesampingkan supaya kepada daerah yang terpilih tersebut menjadi semakin kuat untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat serta melakukan pemeliharaan penuh terhadap sistem ketatanegaraan dan kerakyatan yang dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945. Walaupun sifat dari masyarakat cenderung selalu dinamis, namun esensi dari Pancasila dan UUD 1945 dapat dijadikan sebagai acuan setiap saat (Putra, 2017).

Keadilan merupakan salah satu tujuan terpenting, selain adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Selain tujuan hukum, keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (value). Ada empat nilai yang merupakan fondasi penting bagi suatu kehidupan manusia yang baik yaitu keadilan, kebenaran, hukum dan moral. Namun keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi, sebagaimana dikemukakan Plato: *“Justices is the supreme virtue which harmonize all other virtues”*. Negara kesejahteraan (welfare state) merumuskan pandangan bahwa keberadaan negara tidak hanya sekedar sebagai elemen penjaga keamanan dan pengatur ketertiban semata. Namun jauh lebih besar dari itu, esensi dan status yang diemban adalah sebagai fasilitator untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial merata bagi seluruh lapisan masyarakat. maka dari itu, hierarki dari negara (pemimpin) adalah sejajar, senasib, dan sepenanggungan berdampingan dengan rakyat atau dengan kata lain tidak ada hubungan atasan dan bawahan (Amarini, 2018).

Berbagai penjelasan dan latarbelakang di atas adalah satu penghantar yang baik menurut penulis untuk merepresentasikan tentang bagaimana gambaran dan analisis mengenai adanya kemungkinan transisi kepemimpinan di Kabupaten Ponorogo dalam kontestasi perhelatan Pilkada tahun 2020. Perspektif masyarakat menjadi catatan dan acuan utama, untuk menilai dan menimbang perihal sejauh mana kualitas kepemimpinan sebelumnya yakni di masa kepemimpinan Ipong Muchlissoni sebagai Bupati terpilih periode 2015-2020. Dalam kurun waktu 5 tahun, seharusnya masyarakat sudah mampu untuk mengevaluasi segala aspek maupun capaian di Ponorogo sendiri. Misalnya seperti aspek pembangunan, demokrasi, politik, hukum, infrastruktur, dan lain sebagainya.

Catatan kepemimpinan Bupati Ipong Muchlissoni menjadi sorotan utama, yang seharusnya dimaknai secara mendalam oleh masyarakat Ponorogo melalui pengalaman dan pemahaman dalam 5 tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengerucutkan perspektif masyarakat, hingga memberikan gambaran konkrit tentang dua kemungkinan yakni: munculnya pemimpin baru, atau mempertahankan pemimpin lama. Karena secara resmi, dalam Pilkada Ponorogo di tahun 2020 ini hanya ada dua calon kandidat, maka sangat menarik untuk melakukan penelitian ini.

2. Pembahasan

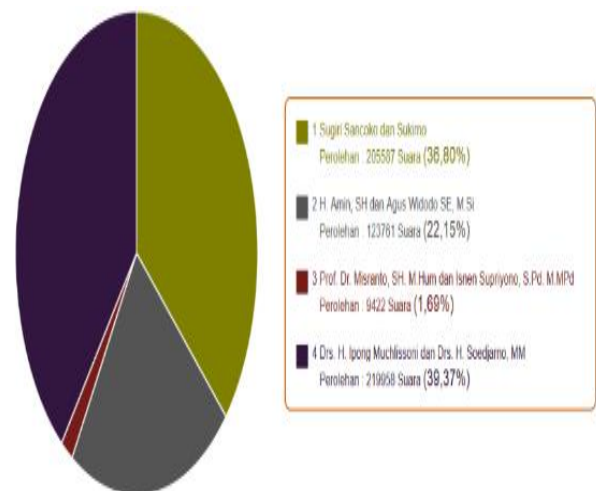
A. Bentuk Persaingan Lama dalam Babak Baru

Pelaksanaan Pilkada Ponorogo di tahun 2020 ini memang berada pada atmosfer yang spesial, mengingat dua kompetitor paslon saling memperebutkan simpati rakyat demi merengkuh kursi nomor 1 di Ponorogo. Dalam menyambut pesta demokrasi rakyat, suasana yang panas memang sangat identik ditemukan di lapangan. Bagaimana pun Pilkada merupakan ajang bergengsi untuk menentukan nasib daerah selama kurun waktu 5 tahun ke depan, sehingga seluruh pihak saling berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Begitu pula di

Ponorogo, baik timses maupun relawan dari kedua pasangan calon sama-sama menunjukkan antusiasme dan dukungan melalui banyak cara.

Tanpa mengesampingkan keberadaan figur pasangan cawabup (Lisdyarita & Bambang), menariknya persaingan pada Pilkada 2020 di Ponorogo adalah antara dua kompetitor lama yakni Sugiri Sancoko VS Ipong Muchlissoni dimana pada Pilkada periode sebelumnya (2015) mereka juga berstatus sebagai cabup di kala itu. Panasnya suhu politik lokal Ponorogo saat itu juga turut mewarnai persaingan yang dibuktikan dengan prosesi panjang serta adu kuat dari kedua belah kubu.

Problematika yang muncul dan dihadapi pasca lahirnya Undang- undang No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah secara langsung, ternyata dialami juga di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali pemilihan umum yang dilakukan di Kabupaten Ponorogo. Pilkada yang telah dilaksanakan, memberikan gambaran bahwa dalam pesta demokrasi tersebut, bermunculan persoalan, puncaknya terjadi ketika pasangan nomor urut 1(satu) Sugiri & Sukirno melayangkan gugatan ke MK dengan dugaan sejumlah kecurangan dan kejanggalan, diantaranya: money politik dan pengelembungan suara. Terkait gugatan yang telah masuk di meja MK nomor 34 itu, KPUD Ponorogo akhirnya menunda penetapan final hasil Pilkada (Hilman et al., 2020).



Sumber: Diolah dari (Harsono, 2018)

Gambar 1. Hasil Perolehan Suara Pilkada Ponorogo Tahun 2015

Sengketa hasil Pilkada yang terjadi pada tahun 2015 di Ponorogo, pada akhirnya mendapat titik terang melalui gugatan dari paslon nomor urut 1 (satu) Sugiri-Sukirno dinyatakan tidak memenuhi syarat legal oleh MK (Mahkamah Konstitusi). MK berdalih bahwa gugatan dengan nomor 12/PHP.BUP-XIV/2016 tidak dapat ditindaklanjuti pada level pengadilan karena hanya berselisih 1% suara, sedangkan menurut MK legal standing yang sah sesuai dengan apa yang tertuang pada ketentuan hukum dalam pasal 158 UU No.8 tahun 2015 serta pasal PMK 1-5/2015 yakni menegaskan bahwa syarat batas selisih suara harus mencapai angka 6,53

persen untuk kemudian dapat ditindaklanjuti secara konstitusional (Hilman et al., 2020).

Babak baru telah dimulai, namun atmosfer persaingan tentu lebih memanas dari kedua belah pihak. Kualitas demokrasi di Ponorogo menjadi semakin tumbuh di tengah semakin beragamnya usaha dari para kompetitor politik, termasuk di dalamnya adalah elemen timses dan para relawan. Ketatnya kompetisi yang berlangsung menandakan bahwa kemajemukan senantiasa dapat berdiri berdampingan walaupun dengan begitu kentara dan mengalirnya perbedaan prinsip maupun pilihan dari kedua belah pihak, sehingga pada akhirnya totalitas menjadi kunci untuk turut menjamin terciptanya persaingan sehat yang semata-mata ditujukan untuk mencetak sosok terbaik dalam memimpin arah pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

B. Aspek-Aspek Pendorong adanya Transisi

Dilatarbelakangi dengan berbagai rekam jejak permasalahan yang datang secara bergilir, atau dengan kata lain mengaburkan arah pembangunan. Beberapa kebijakan sempat menjadi sorotan publik secara serius, dimana masyarakat Ponorogo merasa terhimpit oleh karena memiliki analisa terhadap kelangsungan nasib ke depan. Bagaimana pun, normalnya setiap masyarakat pasti mendambakan kepemimpinan yang adil. Esensi adil adalah lebih kepada kemampuan dalam melakukan manajemen terhadap produktivitas masyarakat dalam mempertahankan kelangsungan hidup, dengan parameter minimal adalah kebutuhan pangan dapat tercukupi setiap saat. Beberapa catatan dari derasnya aspirasi dan gejolak masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kunjungan Kerja ke Bali Menuai Sorotan Aliansi Pemuda Ponorogo

Pada Kamis tepatnya sabtu 21 November 2019, sejumlah aliansi yang terdiri dari puluhan pemuda serta mahasiswa mendatangi kantor DPRD serta Pemkab guna menyampaikan aspirasi secara langsung. Muatan dari aspirasi tersebut adalah perihal menyoroiti efektivitas kunjungan kerja yang dimotori oleh Pemkab Ponorogo dengan cara melibatkan hampir seluruh aparatur desa serta aparatur kecamatan beserta sanak keluarga. Inti dari tuntutan aliansi Pemuda Ponorogo tersebut adalah menganggap bahwa kunjungan kerja yang dilakukan adalah suatu pemborosan, serta sama sekali tidak menyentuh kata substantif.

Substansi yang dikuatkan yakni terkait dengan masih banyak problematika internal dan terbengkalai di Ponorogo seperti infrastruktur jalan rusak, kasus DBD meningkat, serta penanganannya lamban. Di sisi lain, Bali yang identik dengan wisata pantai dan laut juga turut mendasari gerakan aliansi Pemuda dan Mahasiswa untuk menanyakan sisi relevansi dari program kunjungan tersebut (Adzka, 2019).



Sumber: Pers Mahasiswa al-Millah, 2020

Gambar 2. Foto Unjuk Rasa di Depan Kantor DPRD

Sementara itu dikutip dari laman ponorogo.go.id, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni memberikan penjelasan ketika diwawancarai awak media terkait adanya unjuk rasa dari elemen masyarakat Ponorogo dalam menyoroiti persoalan program kunjungan kerja ke bali.



Sumber: ponorogo.go.id, 2020

Gambar 3. Pandangan Bupati Ipong Muchlissoni

Penjelasan yang disampaikan sangat nampak bertolak belakang sekali dengan tuntutan dan alasan para demonstran. Bupati Ipong mengatakan “jadi bagaimana mungkin kita dapat menjadi daerah wisata sementara para pemangku wilayahnya tidak pernah pergi dan mempelajari atau kunker ke daerah wisata. Harapan kita adalah agar para Kades dan camat dapat memperluas wawasan dan paham dengan konsep pengelolaan wisata, maka dari itu Bali menjadi pertimbangan utama karena wilayahnya yang terkemuka di bidang wisata”. Selain itu, Bupati Ipong juga menegaskan tidak ada kepentingan politik, serta menyebut soal total pembiayaan program kunker yakni sebesar 2,4 M atau sekitar 0,7 % dari APBD Ponorogo Tahun 2019 (Kominfo Ponorogo, 2019).

Jika dianalisa, masuk akal apabila dilakukan suatu komparasi terhadap Ponorogo dan Bali sendiri dimana kedua daerah tersebut sangat kentara perbedaannya dari segi geografis, kesukuan, demografis, kekayaan alam,

dan lain sebagainya. Singkatnya adalah wilayah Ponorogo sendiri tidak ada potensi pantai dan laut sama sekali sedangkan Bali selalu identik dengan wisata pantai dan laut, Sehingga alasan-alasan yang dikemukakan turut menguatkan fakta dan rasionalitas di lapangan serta yang terpenting adalah segala tuntutan para demonstran dapat dipertanggungjawabkan di depan publik karena berbasis pergerakan legal. Upaya monitoring merupakan hal yang lumrah jika muncul dari benak masyarakat mengingat setiap hari nya mereka bersentuhan dengan kehidupan sosial, sehingga kepekaan untuk menilai suatu kebijakan sudah sepatutnya muncul. Derasnya aspirasi yang mengalir sekaligus memberikan catatan penting kepada pemerintah Ponorogo terutama kepemimpinan Bupati Ipong Muchlissoni untuk dijadikan sebagai landasan evaluatif, meskipun pemerintah memiliki pandangan lain.

2. Kekecewaan Masyarakat dari Berbagai Elemen dalam Menuntut Kebijakan

Serangkaian aksi unjuk rasa dan tuntutan yang datang dari berbagai elemen masyarakat Ponorogo, saat itu juga sempat menuai perhatian serius dari masyarakat Nasional. Skala permasalahan yang besar pada akhirnya menarik minat para pewarta berita dari berbagai media untuk melakukan liputan di lapangan. Pada akhirnya narasi yang dikemas dalam bahasa berita semakin menyebar secara masif, dan memicu bertambahnya simpati publik.

Ribuan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Ponorogo Tertindas menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD dan Kantor Pemkab Ponorogo pada Rabu (11-04-2018). Berbagai elemen yang melebur menjadi satu diantaranya adalah: kelompok Bentor, pekerja tambang Sampung, warga terdampak pembangunan waduk Bendo, kelompok pedang kaki lima, serta pedagang pasar Songgolangit Ponorogo. Massa melampiaskan kekecewaannya dengan cara melakukan orasi secara bergilir, kemudian membuat sebuah aksi teaterikal yakni membakar patung replika Bupati serta gerobak sebagai wujud kekecewaan. (Arso, 2018).



Sumber: kanalindonesia.com, 2020

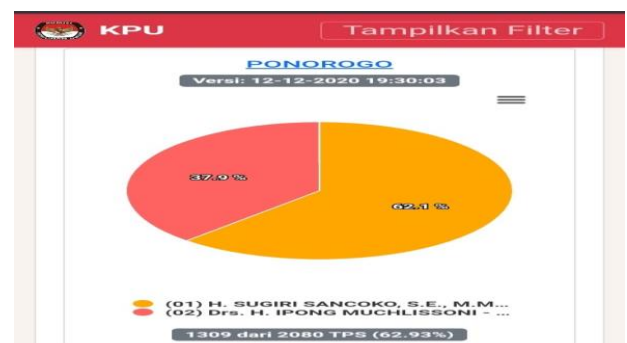
Gambar 4. Dokumentasi Unjuk Rasa

Pada dasarnya, tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance) merupakan isu aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Praktik pemerintahan yang baik dapat meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas sektor publik sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance (Sari & Raharja dalam Sunarmo et al., 2018). Gejala masyarakat di Ponorogo merupakan satu atensi terhadap kompetensi dan kinerja dari pemerintah yang tidak lepas dari monitoring selama masa kepemimpinan Bupati Ipong Muchlissoni.

Menjaga kualitas, kinerja, dan pelayanan memang bukan suatu perkara mudah. Namun sejatinya serangkaian hal tersebut sudah menjadi tugas etis bagi siapapun yang duduk di kursi pemerintahan terutama pimpinan pemerintahan, mengingat setiap langkah yang diambil adalah kontribusi bagi kemajuan negara ini. Kompetensi dan Sumber Daya aparatur pemerintahan adalah roda penggerak yang terkadang belum mampu untuk menopang segala urusan publik, sehingga kehadiran masyarakat (civil society) turut memosisikan diri dalam hubungan kelembagaan dengan pemerintah.

3. Basis Kekuatan Masyarakat Membawa Dampak Signifikan Terhadap Hasil Pilkada

Hierarki hukum tertinggi di negara ini, secara konstitusi menyatakan bahwa hukum tertinggi adalah kedaulatan rakyat. Kesejahteraan dan kepentingan rakyat merupakan skala prioritas dalam tatanan hidup bernegara, dengan kata lain sebenarnya seorang penguasa maupun pimpinan beserta jajaran aparatur pemerintah adalah berstatus sebagai simbol dan representasi untuk mengemban amanah masyarakat. Status keterwakilan yang dibebankan kepada seorang pemimpin terpilih adalah peleburan dari ide dan gagasan yang dituangkan oleh masyarakat banyak. Dalam persoalan Pilkada, kepercayaan sebagian masyarakat Ponorogo mulai dapat terbaca melalui perhitungan hasil sementara yang memberikan keunggulan bukan pada pasangan calon pertahana (Ipong-Bambang). Kasarnya dapat dikatakan bahwa masyarakat Ponorogo menginginkan adanya perombakan (perubahan) pada tampuk kepemimpinan, yang secara tidak langsung beralih menggantungkan pilihan terhadap pasangan calon (Sugiri-Lisdyarita) mengingat tidak ada kandidat lain.



Sumber: kpu.go.id, 2020

Gambar 5. Hasil Sementara Hitung Cepat Pilkada Ponorogo

Hasil perhitungan suara sementara versi hitung cepat yang resmi dilakukan oleh KPU pusat menunjukkan bahwa (Sugiri-Lisdyarita) lumayan telah mengungguli paslon pertahana (Ipong-Bambang) dengan perolehan 62,1 % vs 37,9%. Jika disimak dari data yang diunggah oleh KPU pusat, dari total 21 kecamatan dimenangkan oleh paslon nomor urut 1 (Sugiri-Lisdyarita). Sementara untuk paslon pertahana hanya unggul di 1 kecamatan saja yakni kecamatan Ngebel. Sementara total data yang masuk adalah kisaran 1309 TPS atau 62,93% dari total keseluruhan TPS yang tersebar di Ponorogo yakni sebanyak 2080 TPS. Jika dianalisis secara mendalam walaupun hanya hasil sementara yang bersumber dari kiriman rekapitulasi C1 per TPS secara online, namun kemungkinan besar biasanya hasil semacam itu tidak akan berubah banyak dengan versi real count KPU Ponorogo (manual). Pasalnya selisih angka lumayan jauh, serta keseluruhan data yang masuk sejak hari pertama (9 Desember) selalu stagnan di angka 60% ke atas VS 40% ke bawah.

Faktor koalisi partai yang gemuk pada akhirnya tidak mampu menandingi kehendak masyarakat yang menginginkan adanya transisi kepemimpinan secara legal, andaikata bicara soal perlawanan pada masa melakukan unjuk rasa sebenarnya fenomena tersebut merupakan tragedi sekaligus histori. Dominasi kepentingan partai politik memang sangat kuat, namun pada akhirnya tidak mampu untuk membendung daulat kerakyatan yang tentunya dimotori oleh latarbelakang kebersamaan, senasib, dan sepenanggungan. Istilah bentukan “Koalisi Gajah” pada akhirnya tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi dari internal tim, maupun pengamat politik seperti pada umumnya. Basis kekuatan besar yang juga didukung oleh kecukupan finansial, maupun masif nya pergerakan kader di seluruh titik wilayah terbukti tidak seperti yang diperkirakan. Kalkulasi di atas kertas memang idealnya adalah paslon pertahana mampu menorehkan keunggulan, namun untuk perhelatan Pilkada Ponorogo di tahun 2020 ini sepertinya masyarakat Ponorogo membuktikan sekaligus menegaskan bahwa prinsip dan idealisme masih dapat dipercaya dan dapat dibuktikan dalam kancah perpolitikan elite. Terlepas dari berbagai prediksi dan kepentingan masing-masing pihak, hal yang nampak dan jelas adalah gerakan perubahan telah berusaha dibangun oleh mayoritas masyarakat Ponorogo.



Sumber: kpuponorogokab.go.id, 2020

Gambar 6. Bukti Resmi Dukungan Koalisi Partai

3. Kesimpulan

Transisi kepemimpinan merupakan suatu fase dimana terjadi pergantian seorang figur pemimpin, gaya kepemimpinan, maupun sekedar melanjutkan pembangunan-pembangunan dari estafet pemimpin sebelumnya. Transisi kepemimpinan sangat mungkin terjadi, keberadaannya dijamin oleh aturan perundang-undangan. Kepastian hukum melekat secara penuh, termasuk kepada para kompetitor politik dan partisipator murni yakni masyarakat. Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah perwujudan dari implementasi negara sebagai fasilitator terhadap kesejahteraan keberlangsungan hidup masyarakat daerah.

Nilai fundamental yang diusung dalam semangat dan antusiasme pada ajang Pilkada sejatinya selalu condong terhadap kepentingan rakyat banyak, dibuktikan dengan berbagai kegiatan dengan pelibatan massa, serta adu gagasan maupun visi misi antar para kompetitor politik (pasangan calon). Masing-masing kompetitor berusaha mencuri perhatian publik dengan sebaik mungkin, sehingga terbentuk euforia besar. Masyarakat mulai melebur ke dalam ikatan yang bernama simpati, untuk turut mempercayai salah satu calon kandidat. Perbedaan di lapangan terletak hanya pada batas pilihan dan selera politik masing-masing, walau kadang perang dingin dan perseteruan tidak dapat dihindarkan. Namun kedewasaan masyarakat menjadi semakin membaik ketika mampu menyelesaikan adanya sengketa paham di tengah-tengah gelaran Pilkada.

Kesimpulan yang dapat dilihat dari pesta demokrasi di Ponorogo pada Pilkada 2020 ini adalah, telah terbentuk semacam kepercayaan baru yang mampu untuk mempengaruhi opini orang banyak dimana secara fundamental kekompakan masyarakat tidak selamanya dapat ditaklukkan dengan mudah. Mayoritas masyarakat Ponorogo terbukti mampu membaca situasi dan menempatkan diri dengan seadil-adilnya, dilandasi dengan nilai dan kesetaraan moral yang sama. Pada akhirnya, mobilisasi masyarakat memiliki kekuatan yang lebih besar daripada dominasi mayoritas partai politik elite. Pertarungan antar koalisi dari masing-masing kandidat menjadi tidak begitu berarti, serta dikalahkan oleh daulat rakyat sebagai elemen utama dalam demokrasi.

Daftar Pustaka

Adzka. (2019). *Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Ponorogo Gugat Kunjungan Kerja Lurah ke Bali*. <http://www.lpmalmillah.com/2019/02/aliansi-pemuda-dan-mahasiswa-ponorogo.html>

Akbar, I. (2017). Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia. *CosmoGov*, 2(1), 95. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852>

Amarini, I. (2018). Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 162–170.

- <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0111.162-170>
- Arso. (2018). *Tak Segera Ada Solusi, Aliansi Masyarakat Tertindas Ponorogo Gelar Demo*. <https://kanalindonesia.com/40675/2018/04/11/tak-segera-ada-solusi-aliansi-masyarakat-tertindas-ponorogo-gelar-demo/>
- Harsono, J. (2018). Analisis Sikap Politik Warga Muhammadiyah Ponorogo Dalam Pilkada 2015. *Aristo*, 81 - 98.
- Hilman, Y. A., Khoirurrosyidin, K., & Lestari, N. (2020). Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 129–148. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8983>
- Kominfo Ponorogo. (2019). *Kunker Para Kades Ponorogo ke Bali, Ini Pertimbangan Bupati*.
- KPU Indonesia. (2020). *Pemilihan Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Walikota*. <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsur/35>
- KPU Ponorogo. (2020). *Pengumuman Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Pemilihan Tahun 2020*. <https://kpu-ponorogokab.go.id/index.php/2020/09/25/pengumuman-nomor-urut-dan-daftar-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-ponorogo-pemilihan-tahun-2020/>
- Lili Hasanudin, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Menuju Terwujudnya Pemerintahan Lokal Yang Demokratis Di Indonesia*, Makalah Pada Seminar Nasional Pemilihan Langsung Kepala Daerah Sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003
- Muluk, Hamdi. 2012. *Pengantar Psikologi Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Putra, F. (2017). Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Proses Percepatan Pembangunan Guna Mewujudkan Masyarakat Madani. *JISIP-UNJA*, 1.
- Ramdhani, L. E. (2015). Fenomena Kepemimpinan Fenomenal. *Jurnal Borneo Administrator*, 11(3), 268–296.
- Sunarmo, A. S., Widianingsih, R. W., Pratiwi, U. P., & Hidayat, T. H. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), 9–18. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i1.2126>
- Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 36–48. <https://doi.org/10.24269/v2.n2.2017.36-48>
- Undang-undang No. 8 Tahun 2015 *Tentang Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*.
- Widodo, W. (2015). Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila. *Civis*, 5(1), 679–691. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/629>